

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Kajian Pustaka

1.1.1 Pengertian Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial masyarakat sosial, sehingga konflik bersifat inheren, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Di dalam kehidupan sosial tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Realitas dilapangan menunjukkan bahwa dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan (Setiadi & Kolip, 2011: 345)

Konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia, karena konflik memiliki fungsi positif (George Simmel, 1981: Lewis Coser, 1957), konflik menjadi dinamika sejarah manusia (Karl Marx, 1880/2003 : Ibnu Khaldun, 1332-1406). Manusia adalah makhluk konflik (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun

terpaksa. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia yang disusun Poerwadadarmata (1976), konflik berarti pertentangan atau percecokan. Pertentangan sendiri bisa muncul kedalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak bersebrangan. Francis menambahkan unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya (Francis, 2006 :7). Sehingga konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar orang (*interpersonal conflict*), konflik antara kelompok (*intergroup conflict*), konflik antara kelompok dengan negaranya, konflik antar negara (*state conflict*). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya. Masyarakat manusia di dunia pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antara perorangan sampai antar negara. Konflik yang bisa dikelola secara arif dan bijaksana akan mendinamisasikan proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan. Namun dalam catatan sejarah masyarakat dunia, konflik diikuti oleh bentuk-bentuk kekerasan, seperti perang dan pembantaian (Susan 2009: 4-5)

Menurut Lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas (Lawang, 1994: 53)

Konflik merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Konflik terjadi dikarenakan suatu kondisi pertentangan dari kepentingan yang berbeda, dimana masing-masing pihak berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang mereka anggap benar. Sebagai makhluk sosial manusia sering dihadapkan dengan kenyataan ketika kepentingan-kepentingan individunya harus dikorbankan untuk sesuatu yang disebut sebagai kepentingan sosial, makhluk sosial sangat rentan untuk berkonflik, karena setiap jiwa memiliki kepentingan dan pandangan berbeda-beda atas segala sesuatu. Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya (Hasanah 2008 : 87)

1. Jenis dan tipe konflik:

Ada dua jenis konflik

a. Konflik Vertikal (Konflik atas)

Konflik antara elite dan massa (rakyat). Elite disini bisa para pengambil kebijakan, kelompok bisnis atau partner militer. Hal yang menonjol dalam konflik ini adalah digunakanya instrumen kekerasan negara, sehingga timbul korban dikalngan massa (rakyat).

b. Konflik Horizontal

Konflik yang terjadi di kalangan massa (rakyat) sendiri. Dalam kurung kurun lima tahun terakhir (sejak pertengahan 90-an), dirasakan setidaknya ada dua jenis konflik horizontal yang tergolong besar pengaruhnya: *Pertama* konflik antar agama, kususnya antar kelompok

agama islam dan kelompok agama nasrani. *Kedua* konflik antarsuku, khususnya konflik antar suku jawa dan suku-suku lain di luar pulau jawa (Susan, 2010 : 99)

Konflik dibedakan di antara dua sumbu, yaitu sasaran dan perilaku yang kemudian dapat menggambarkan tipe-tipe konflik yang menuntun ke berbagai bentuk kemungkinan intervensi.

a. Tanpa Konflik

Tanpa konflik menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan-hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai. Tipe ini bukan berarti tidak ada konflik berarti dalam masyarakat, akan tetapi ada beberapa kemungkinan atas situasi ini .

b. Konflik Laten :

Suatu keadaan yang didalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani . kehidupan masyarakat yang tampak stabil dan harmonis belum merupakan jaminan bahwa didalam masyarakat tidak terdapat permusuhan dan pertentangan.

c. Konflik Terbuka

Situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.

d. Konflik di Permukaan

Konflik dipermukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat

diatasi dengan meningkatnya komunikasi (dialog terbuka) (Susan, 2010 : 100-1010)

2. Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat (Setiadi dan Kolip 2011: 361)

Ketidak meratanya pembagian aset-aset sosial di dalam msayarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menabahnya bagi yang peroleh aset sosialnay relatif kecil atau sedikit. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan atau menambahinya disebut sebagai status need. Pada dasarnya secara sederhana penyebab konflik dibgai menjadi dua yaitu :

1. Kemajemukan horizontal yang artinya adalah struktur masyrakat yang mejemuk secara kultur, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, artawan, alim ulama, sopir, dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karateristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin memepertahankan karaterisitk budayanya tersebut. dalam mansyrakat yang

strukturalnya seperti ini, jika belum ada konsekuensinya nilai menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara dan gerakan seperti ini. Jika situasi ini terjadi, maka masyarakat tersebut mengalami disintegrasi.

2. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolrisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan (Setiadi dan Kolip 2011: 361)

2.1.2 Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah suatu bidang tanah yang padanya melengket hak ulayat dari suatu persekutuan hukum adat. Dengan demikian untuk menentukan apakah suatu bidang tanah tertentu adalah tanah ulayat atau bukan, pertama-tama kita harus memperhatikan apakah ada persekutuan hukum adat yang berkuasa atas tanah itu. Persekutuan hukum adat sering pula disebut orang sebagai masyarakat hukum adat, namun persekutuan hukum adat bukanlah sekedar sekelompok orang yang berkumpul saja. Persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang (lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, termasuk yang akan lahir) yang merasa sebagai suatu kesatuan yang utuh, baik karena faktor genealogis, teritorial maupun kepentingan, mempunyai struktur organisasi yang jelas, mempunyai pimpinan, mempunyai harta kekayaan yang disendirikan, baik berujud maupun yang tak berujud (Abna & Sulaiman, 2007)

Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak ulayat. Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Hak ulayat merupakan kolektif dan bukan merupakan hak individual yang dapat dimiliki seseorang atau keluarga, tetapi menjadi *beschikingsrecht* masyarakat (hukum). Hak ulayat mempunyai hubungan yang tetap/abadi dengan masyarakat hukum pendukungnya artinya tetap ada sepanjang tanah sebagai obyek dan masyarakat sebagai subyek haknya (Hastuti, 2005 : 41)

a. Tanah Sebagai Kekayaan Masyarakat Adat

Kekayaan masyarakat adat adalah satu kesatuan terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing warganya. kekayaan tersebut dapat berupa lembag adat, hamparan tanah, rumah adat, upacara dan perlengkapannya. Kekayaan yang berupa tanah berdampak penting bagi kelestarian suatu masyarakat adat. Kuat lemahnya (hak ulayat bergantung pada luas sempitnya tanah yang secara langsung dikuasi oleh masyarakat adat dan kuat lemahnya hak yang diberikan kepada para warga dan kelompok warganya. Dari sudut pandang hukum formal, Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1994 merumuskan tanah ulayat sebagai tanah masyarakat adat yang tidak mengandung unsur kepemilikan perorangan. Padahal, hukum adat menganut

pengertian tentang tanah yang lebih dari itu, yaitu sebagai tanda kesepakatan anggota masyarakat untuk menerima tanggung jawab sebagai penjaga keberadaan dan kegunaan untuk kesejahteraan anggota masyarakat kini dan yang akan datang (Hastuti, 2005 : 43)

Menurut Mohamad Koesno 1995 tanah ulayat meliputi tiga bagian pokok :

- a. Lingkungan tempat tinggal sebagai pusat persekutuan
- b. Lingkungan usaha para warga yakni berupa sawah, kebun, ladang, hutan
- c. Lingkungan tanah persediaan, yakni hutan belukar di luar lingkungan usaha tersebut (Hastuti, 2005 : 45)
- d. Bagi masyarakat adat, tanah adat berfungsi untuk mencakupi kebutuhan magis-religius, ekonomi, dan sosial. Ketiga fungsi diterangkan oleh Muhammad Tauchid antara lain:

- a. Fungsi Sosial

Untuk keamanan seluruh warga dan orang asing dalam hak atas tanah

- b. Fungsi Religius

Sebagai sumber hidup manusia yang harus dimuliakan oleh masyarakat adat secara bersama, tempat kediaman orang-orang halus pelindung dan arwah leluhur. Fungsi ini menimbulkan upacara-upacar selamatn umum, sebagai imbalan transaksi tanah yang berwujud benda-benda bernilai magis.

- c. Fungsi Ekonomi

Untuk keperluan penghidupan warga dan tempat tinggal (Hastuti 2005 : 46). Sebagian besar tanah ulayat pada kenyataanya berupa

tanah hutan yang pengaturannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Undang-undang tersebut dapat juga disebut undang-undang Pokok Kehutanan (UUPK). Sepertinya halnya UUPA, UUPK juga mengakui adanya hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dengan memperhatikan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dan tanahnya itu berarti memberikan pengakuan adanya hak ulayat (Hastuti, 2005 : 49)

Batas-batas tanah ulayat mempergunakan ukuran-ukuran: Kerukunan, kepatuhan dan keselarasan. Kerukunan dengan melihat kepada hubungannya persekutuan hukum yang bersangkutan. Kepatuhan, berpedoman kepada jumlah warga persekutuan dan kepatuhannya terhadap kebutuhan setiap warga untuk menghidupi dirinya dan keluarga beserta anak turunannya. Keselarsan, dengan memperhatikan keadaan-keadaan nyata dalam kemasyarakatan maupun realitas keadaan alamnya (Hastuti, 2005: 59)

2.1.3 Desa

Berbeda dengan Kota, Desa merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah, bermata pencaharian di bidang agraris, memiliki bangunan tempat tinggal yang berpencar-pencar, penduduk yang memiliki hubungan sosial yang sangat tinggi, serta bersifat hegemony.

Desa Adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan *rumah tangganya* sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Indonesia (Beratha 1982: 42)

Ada beberapa faktor yang mendasari masyarakat Desa Antara lain adalah *“hubungan kekerabatan yang sangat erat”*. Setiap orang yang persekutuan suatu Desa akan membentuk kekuatan dengan kekerabatan atau persaudaraan. Hubungan yang mereka jalani merupakan jaringan yang sangat erat bagaikan semua sandi kehidupan. Kekuatan itulah yang menilai suatu perbuatan. Penghormatan terhadap garis keturunan atau nenek moyang moyang merupakan patron atau pola tingkah. *“Hubungan yang tinggal berdekatan”*. Rasa ketertarikan kepada wilayah menjadi pangkal penilaian utama atas hubungan-hubungan dengan sesama. Tata hubungan diatur sangat tajam oleh warga asli. Hal inilah yang mendasar ketertarikan dan kesetiaan kepada orang-orang yang terdekat denganya. *“Memiliki tujuan khusus”*. Prinsip ini nampak dengan adanya kekuasaan tertentu yang menata tingkah laku persekutuan berdasarkan nilai keahlian atau keterampilan khusus. Serta terakhir adalah menghargai atasan dan rasa ketergantungan kepada atasan. Apa yang datang dari atas merupakan sesuatu yang harus ditaati. Berikut ini terdapat beberapa pengertian mengenai Desa menurut para ahli:

“Dari aspek morfologi, desa adalah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk kecil atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpancar (jarang)”

“Dari aspek jumlah penduduk maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah” (Imam, 1993: 93-94)

“Dari aspek ekonomi, Desa adalah wilayah penduduk atau masyarakat bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanaman atau agraria, atau nelayan”

“Dilihat dari segi sosial budaya, desa tampak dari hubungan sosial antara penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan dan kurang tampak adanya pengkotaan, atau dengan kata lain bersifat homogen atau bergotong royong”

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa desa merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk lebih kecil, hubungan masyarakat desa sangat erat (kekeluargaan) dan sebagian penduduknya bermatapencaharian di bidang agraris. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini setiap desa atau daerah seperti yang telah disebutkan diatas, mempunyai suatu kebiasaan yang berbeda-beda, demikian juga halnya di Daerah atau Desa-Desa di Flores Timur ini. Apabila suatu kebiasaan dianggap baik, maka tidak dapat semata-mata dianggap sebagai cara berperilaku akan tetap diterima sebagai kaidah pengatur, maka kebiasaan akan berubah menjadi tata kelakuan. Tata kelakuan dimana tidak hanya dikenal dan diakui, akan tetapi juga dihargai. Tata kelakuan yang kekal dan kuat ada isitadatnya.

1. Ciri-ciri masyarakat Desa :

Secara umum, dalam kehidupan masyarakat di Desa dapat kita lihat dari beberapa ciri kehidupan, atau katakanlah ada beberapa karakteristik. Yang ini terutama diperlihatkan oleh Roucek & Warren (1963:78) antara lain:

- a. Memiliki sifat yang homogen dalam hal (mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan, serta sikap dan tingkah laku)
- b. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut terlibat dalam kegiatan pertanian ataupun mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

- c. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada (misalnya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirnya)
- d. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet daripada di Kota, serta jumlah anak yang ada didalam keluarga itu lebih besar/banyak (Leibo, 1990 : 3)

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan tentang konflik tanah ulayat antara desa redontena dan desa adobala yang pertama, penelitian milik Krinus Kum tahun 2012 yang berjudul Konflik Antara Etnis Amunge Dengan Etnis Kei Tentang Tuntutan Tanah Di Timika. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu milik Guruh Fatah Marsuki tahun 2004 yang berjudul Konflik Agraria Pada Masyarakat (Studi Kasus Konflik Agraria di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu milik Yuliyah Hasanah tahun 2008 yang berjudul Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Tanah Ulayat Baduy Pada Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus: Masyarakat Baduy dalam dan Baduy Luar, Desa Kanenikes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Propinsi Banten. Selain itu penelitian terdahulu juga di ambil dari jurnal internasional yaitu milik Najmu L Sopian dengan Juudul, Penyelesaian Sengketa informal berdsarkan adat (Studi Kasus :Sengketa tanah distrik SOA Kabupaten Ngada.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Dapat dilihat dari judul penelitian dan hasil temuan masing-masing penelitian terdahulu yang telah dilakukan, sehingga dapat ditemukan

relevansi antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. Hasil temuan dan relevansi penelitian dapat dilihat dari tabel penelitian terdahulu berikut

	Judul	Hasil	Relevansi
1.	Nama: Krinus Kum Tahun: 2012 Judul : Konflik Antar Etnis Amunge Dengan Etnis Kei Tentang Tuntutan Tanah Di Timia.	Hasil penelitian : Masalah tanah di Kabupaten Mimika juga merupakan tanah hak ulayat yang bersifat turun-temurun yang mempunyai suku amunge dan suku Komoro, dan menjadi banyak sekalian persoalan di Kabupaten Mimika ini adalah masalah kepemilikan tanah.	Konflik antar etnis merupakan salah satu fenomena yang tidak bisa dipungkiri dari kehidupan manusia baik dalam kelompok komunitas, masyarakat, bangsa dan negara hampir setiap konflik ternyata kehadiran freeport di kabupaten mimika juga menambah kemajemukan karena perusahaan ini banyak mendatangkan pekerja dari luar mimika atau dari luar papua
2	Nama : Guruh Fatah Marsuki Tahun : 2004 Judul : Konflik Agraria Pada Masyarakat (Studi Kasus Konflik Agraria di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang	Hasil penelitian: Konflik Agraria di Senggreng terjadi dalam dua periode yaitu 1958-1965 merupakan awal mula timbulnya konflik, sedangkan tahun 2000 merupakan bom waktu yang meledak, karena konflik agraria di tahun 1958-1965 tidak selesai secara tuntas. Penyebab dari konflik ini adalah adanya kondisi, sosial, teknik dan politik.	Konflik agraria yang terjadi antara masyarakat desa Senggreng, TNI Angkatan Udara dan Perhutani ini merupakan konflik yang memperebutkan tanah Mbaan.

3.	<p>Nama : Yuliyah Hasanah</p> <p>Tahun : 2008</p> <p>Judul : Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Tanah Ulayat Baduy Pada Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus: Masyarakat Baduy dalam dan Baduy Luar, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Propinsi Banten.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang Konflik antara warga Baduy dan warga Luar Baduy. Konflik ini muncul akibat karena ketidakpahaman warga luar Baduy ditunjukkan dengan tindakan penyerobotan terhadap sumberdaya hutan serta penebangan pohon secara bebas. Selain itu, warga luar Baduy pun melanggar pantangan adat Baduy dengan membuat sawah, menggunakan tanah untuk berladang, apalagi tanpa izin pihak Desa Kanekes, serta penggembalaan hewan ternak yang dibebaskan ke kawasan hutan lindung. Penyerobotan tersebut menyebabkan kerusakan alam, tanah longsor serta erosi. Tidak hanya itu, wilayah Banten yang mendapat sumber air dari Baduy pun mengalami penghambatan akibat gundulnya</p>	<p>Konflik pemilikan/penguasaan tanah terkait dengan keberadaan hukum adat set empat (tanah ulayat). Pada sebagian masyarakat adat, ada yang mengklaim dirinya sebagai pemilik tanah ulayat. Seperti halnya pada masyarakat adat Baduy, bahwa pimpinan/<i>jaro</i> yang bertempat tinggal di kawasan tanah ulayat yang saat ini didudukinya adalah milik masyarakat adat Baduy, sehingga masyarakat Baduy memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara tanah ulayat terkait dengan keseimbangan lingkungan.</p>
----	---	--	--

		hutan.	
	Jurnal Internasional Nama: Najmu L. Sopian Judul : Penyelesaian Sengketa informal berdasarkan adat (Studi Kasus :Sengketa tanah distrik SOA Kabupaten Ngada, Flores Tahun : 2014	Hasil : faktor yang menyebabkan terjadinya Sengketa tanah ulayat yang terjadi antara Desa Seso (suku meli) dengan masyarakat desa Waepana di kecamatan SOA Kabupaten Ngada, flores, adalah batas tanah ulayat yang tidak jelas, adanya praktik ketidakadilan, adanya klaim dari negara dan pemerintah.	Sengketa tanah ulayat yang terjadi ini berwal dari masyarakat Desa Seso melihat dan merasa bahwa tanah yang dilokasi Turuweda adalah tanah yang diwariskan turun- temurunoleh leluhur kepada masyarakat adat. Masyarakat Desa Seso merasa orang-orang yang mendiami lahan menguasai lokasi lahan tersebut merupakan perampasan haka-hak mereaka yang diwariskan. sehingga tanah yang dinggap tanah suku harus dipertahankan. Sehingga masyarakat Desa Seso dan masyarakat Desa Waepana berkonflik

Landasan Teori : Teori Konflik (Lewis Coseer)

Teori yang menjadi acuan penelitian ini adalah teori konflik karya dari Lewis. Dalam membahas berbagai situasi konflik, Coser membedakan konflik menjadi dua macam yaitu konflik realistik dan non realistik. Konflik realistik memiliki sumber yang konkret atau bersifat materil, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber rebutan itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik. Sedangkan konflik non realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti konflik antar agama, antar etnis dan konflik antar kepercayaan lainnya. Dalam penelitian ini peneliti cenderung menggunakan konflik realistik (Susan 2009: 54-55). karena konflik tanah ulayat

yang terjadi antara Desa Redontena dan Desa Adonara ini adalah konflik yang diakibatkan karena perebutana sumber daya (Tanah)

Konflik merupakan alat-alat untuk mendapatkan hasil-hasil tertentu. Langkah-langkah untuk mencapai hasil ini jelas disetujui oleh kebudayaan mereka. Dengan kata lain, konflik realistik sebenarnya mengejar: power, status yang langka, resources (sumber daya), dan nilai-nilai. Konflik akan berhenti jika aktor dapat menemukan pengganti yang sejajar dan memuaskan untuk mendapatkan hasil akhir. Konflik realistik terdapat pilihan-pilihan fungsional sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pilihan-pilihan amat bergantung pada penilaian partisipan atas solusi yang selalu tersedia. Konflik realistik khususnya dapat diikuti oleh sentiment-sentimen yang secara emosional mengalami distorsi oleh karena pengungkapan ketegangan tidak mungkin terjadi dalam situasi konflik yang lain.

Coser menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber kekayaan yang persedianya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga memojokan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka. Lebih lanjut coser menyatakan, perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu, kumpulan (collectivities), atau antara individu dan kumpulan. Bagaimanapun konflik antar kelompok maupun yang intra kelompok senantiasa ada ditempat orang hidup bersama. Menurut Coser konflik juga merupakan unsur interaksi yang penting, dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah ataupun merusak. Konflik bisa saja menyumbang banyak kepada

kelestarian kelompok dan mempererat hubungan antara anggotanya. Seperti menghadapi musuh bersama dapat mengintegrasikan orang, menghasilkan solidaritas dan keterlibatan, dan membuat orang lupa akan perselisihan intern mereka sendiri.

Fungsi positif dari konflik menurut Lewis A Coser merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan dan bahkan untuk mempertegas sistem sosial yang ada. Proposisi yang dikemukakan oleh Lewis Coser yaitu :

1. Kekuatan solidaritas internal dan integritas kelompok dalam (in group) akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau suatu konflik dengan kelompok luar bertambah besar.
2. Integritas yang semakin tinggi dari kelompok dalam konflik dapat membantu memperkuat batas antar kelompok itu dan kelompok lainnya dalam lingkungan itu, khususnya kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan.
3. Di dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan atau pengatukan, dan semakin tingginya tekanan pada konsensus dan konformitas
4. Para menyimpang dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi, kalau mereka tidak dapat dibujuk masuk ke jalan yang benar, mereka kemungkinan diusir atau dimasukkan dalam pengawasan yang ketat.
5. Dan sebaliknya, apabila kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekompakan, konformitas, dan komitmen terhadap kelompok itu kemungkinan sangat berkurang . ketidaksepakatan internal mungkin dapat muncul ke permukaan dan dibicarakan.

Seperti yang pernah diungkapkan oleh Coser bahwa fungsi konflik eksternal untuk memperkuat kekompakan internal dan meningkatkan moral kelompok sedemikian pentingnya, sehingga kelompok (pemimpin kelompok) dapat berusaha memancing antagonisme dengan kelompok luar atau menciptakan musuh dengan orang luar supaya mempertahankan atau meningkatkan solidaritas internal (Poloma, 1994: 108).

Konflik sebagai agen untuk mempersatukan masyarakat adalah sebuah pemikiran yang sejak lama diakui tukang propoganda yang dapat menciptakan musuh yang sebenarnya tak ada, atau mencoba antagonism terhadap lawan yang tidak aktif. Konflik mempunyai dua wajah, pertama memberikan kontribusi terhadap integritas sistem sosial. Kedua, mengakibatkan terjadinya perubahan sosial.

Pada dasarnya konflik juga membantu fungsi komunikasi. Sebelum konflik, kelompok-kelompok mungkin tidak percaya posisi musuh mereka, tetapi akibat konflik, posisi dan batas antar kelompok ini sering menjadi diperjelas. Karena itu individu bertambah mampu memutuskan untuk mengambil tindakan yang tepat dalam hubungan dengan musuh mereka. Konflik juga memungkinkan pihak yang bertikai menemukan ide yang lebih baik mengenai kekuatan relatif mereka dan meningkatkan kemungkinan untuk saling mendekati atau saling berdamai.

Konflik memang kadang kala bernuansa kekerasan arti dari kekerasan itu sendiri adalah kekerasan (*violence*) secara etimologi berasal dari bahasa latin "*Vis*" yang artinya kekuatan, kehebatan, kedahsyatan dan kekerasan dan kata yang artinya membawa. Dari istilah tersebut berarti "*Vislatus*" berarti membawa kekuatan, kehebatan, kedahsyatan dan kekerasan. Namun secara terminologis berarti perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang atau kelompok yang menyebabkan kerusakan fisik pada barang.

Menurut Robert Audi mendefinisikan kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang, atau serangan, penghancuran perisakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang.

Menurut Johan Galtung lebih menggunakan analisis berdasarkan aspek psikologis. Ia mengartikan kekerasan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Kekerasan terjadi bilamana manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensial. Dua indikasi dan pengertian kekerasan :

- a. Kekerasan dalam arti sempit menunjuk pada tindakan yang berupa serangan, perusakan, penghancuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Dengan demikian, kekerasan menunjukan pada tindakan fisik yang bersifat personal, artinya mengarah pada orang atau kelompok tertentu yang dilakukan secara sengaja, langsung, dan aktual.
- b. Kekerasan dalam arti luas, menunjuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologis, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang baik yang dilakukan secara sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural. Yang dimaksud dengan kekerasan secara struktural adalah kekerasan yang terjadi didalam struktur sosial, seperti penindasan yang dilakukan oleh Negara otoriter, sistem yang membuat kehidupan sosial tidak adil (Setiadi dan Kolip 2011 : 358)